

**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK**  
**KOMISI I DPR RI KE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**27 – 29 NOVEMBER 2018**

---

Komisi I DPR RI melaksanakan Kunker Spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 – 29 November 2019 dalam rangka mengetahui peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam menayangkan berita Pemilu yang obyektif dan berimbang dan peran KPI Daerah dalam mengawasi isi siaran dan iklan politik di lembaga penyiaran.

Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Yogyakarta dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A., dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi I DPR RI dari berbagai Fraksi.

Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Yogyakarta melaksanakan pertemuan dengan Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Kepala Stasiun LPP TVRI Yogyakarta, Ketua KPID Yogyakarta, dan Stakeholder terkait lainnya.

Dalam pertemuan, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta menayangkan beberapa Program Siaran LPP RRI Yogyakarta dan siaran Berita Pemilu (Agustus 2018 - April 2019). Sementara, LPP TVRI Stasiun Yogyakarta menjelaskan peran TVRI Stasiun Yogyakarta dalam Pemilu 2019 antara lain melakukan audiensi dengan KPU, BAWASLU dalam rangka penjelasan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), membentuk Tim Pemilu yang bertugas menyusun agenda siaran pemilu 2019, menyediakan slot waktu untuk program yang bersifat penerangan/literasi media dengan durasi 60 menit (minimal seminggu sekali), menyajikan program pengenalan para Caleg/DPD dengan mengacu pada PKPU, P3SPS KPI, dan BAWASLU, dan menyiarkan iklan kampanye pada saat masa kampanye (24 Maret – 13 April 2019), serta melakukan langkah-langkah konkret penting lainnya. Sementara itu, KPID Yogyakarta menjelaskan relasi Media (Penyiaran) – Pemilu, yaitu hak publik untuk mengetahui informasi kepiluan secara utuh dan proporsional, terutama melalui media; hak dan kewajiban media untuk memberitakan/menyiarkan informasi kepiluan secara adil dan berimbang; hak peserta pemilu untuk menggunakan media sebagai sarana komunikasi politik dan kewajiban pendidikan politik kepada publik; hak dan kewajiban penyelenggara pemilu untuk mensosialisasikan pemilu berkualitas dan mengajak partisipasi masyarakat melalui media. KPID Yogyakarta juga menjelaskan sinergitas KPI-KPU-Bawaslu dengan melakukan kerja sama tentang pengaturan dan pengawasan penyiaran Pemilu, membentuk Desk Penyiaran Pemilu bersama lembaga lain yang terkait, dan merumuskan Pemahaman Bersama tentang Aturan Penyiaran Pemilu sebagai acuan operasional pengaturan dan pengawasan penyiaran Pemilu.

Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI menekankan perlunya memperhatikan pemasukan dari siaran iklan bagi LPP RRI maupun LPP TVRI (berhubungan dengan iklan Politik), karena LPS sendiri mendapat pemasukan dari hal tersebut. Tim juga mendorong agar LPP RRI Yogyakarta dan LPP TVRI Yogyakarta dapat meningkatkan dan membuat isi konten siaran yang bermuatan kearifan lokal dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kebhinekaan bangsa; meningkatkan dan menformat ulang isi konten siaran LPP yang dimilikinya agar acara isi siaran LPP dapat lebih dimintati lagi oleh masyarakat; dan meningkatkan kreatifitas acara yang telah diminati oleh masyarakat Yogyakarta.

Selanjutnya Tim mengapresiasi LPP RRI Yogyakarta yang siarannya sudah menjangkau sampai ke Gunung Kidul dan Tim mendesak agar LPP RRI Yogyakarta dan LPP TVRI Yogyakarta dapat berkoordinasi dengan baik dan melakukan sinergitas serta kerja sama yang baik dengan Kemkominfo. Untuk KPID Yogyakarta, Tim mendesak agar KPID Yogyakarta meningkatkan pengawasan isi siaran bagi lembaga-lembaga Penyiaran di Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 November 2018

Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Yogyakarta